

2024, Sampah Paling Banyak Jadi Sorotan

YOGYA (KR) - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta menyebut, masalah sampah yang paling dominan dari hasil pemantauan di lapangan maupun aduan masyarakat selama tahun 2024 ini. Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba menuturkan, persoalan sampah belum sepenuhnya terselesaikan dengan baik.

Desentralisasi pengelolaan sampah ditiap daerah di DIY belum semuanya bisa dilakukan karena persoalan terbatasnya lahan seperti di Kota Yogyakarta. Sehingga tumpukkan sampah terjadi di sejumlah titik pinggir jalan maupun depo sampah yang dijadikan langganan untuk membuang sampah.

"Di taman Jalan Kenari, tepatnya di selatan Stadion Mandala Krida Yogyakarta, dijadikan salah satu tempat untuk membuang sampah liar, selain di taman dekat Pasar Demangan Kota Yogyakarta," tutur Kamba, Jumat (27/12).

Tidak hanya dipinggir jalan yang dijadikan sebagai tempat membuang sampah liar tetapi di jem-

batan juga kerap dijadikan sebagai tempat membuang sampah.

"Seperti di Jembatan Juminahan, Kota Yogyakarta, bahkan sampah menumpuk tidak jauh dari sekolah," lanjutnya.

Kamba mengungkapkan, meskipun sudah ada tindakan justisia bagi pembuang sampah liar, yakni berupa vonis denda dalam sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) karena melanggar Perda tentang sampah, namun hal tersebut belum memberikan efek jera bagi pembuang sampah liar lainnya. Diharapkan pemimpin daerah kedepannya dapat lebih serius mem-bereskan persoalan sampah yang ada di Kota Yogyakarta. Selain itu persoalan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih jadi temuan khususnya jalur zonasi yang perlu perbaikan regulasi. Tahun 2024 ini, Forpi Kota Yogyakarta tidak menemukan adanya 'nitip KK' dengan modus famili lain.

"Diharapkan pada PPDB tahun ajaran 2025/2026 nanti jalur zonasi tetap ada meski kuotanya tidak sebanyak jalur prestasi atau nilai. Tidak perlu dihilangkan, begitupun ASPD (Assesment Standardisasi Pendidikan Daerah) tetap dipertahankan," katanya. Kamba menyampaikan, calon siswa khususnya pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) perlu pengawasan ketat agar

tepat sasaran dan fenomena memiskinkan diri dapat diminimalisir.

Selain itu, pada saat liburan, Kawasan Malioboro yang seharusnya merupakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) namun dari hasil pantauan selama ini masih ditemukan sejumlah orang yang merokok di kawasan pedestrian Malioboro. Perlu ada sosialisasi, edukasi dan tempat yang nyaman bagi para perokok di kawasan Malioboro.

"Parkir liar dan pelanggaran tarif parkir masih ditemukan pada tahun 2024 ini. Meskipun tindakan preventif dan justisi kerap dilakukan oleh pihak berwenang, namun belum memberikan efek jera terutama pada masa liburan," tambahnya.

Juga netralitas ASN pada Pilkada Kota Yogyakarta menjadi konsen Forpi Kota Yogyakarta dan Raperda Kota Yogyakarta tentang pengen-



KR-Istimewa

Pantauan Forpi Kota Yogyakarta masalah sampah di Kota Yogyakarta.

dalian Miras diharapkan rampung pada periode saat ini. Beberapa proyek strategis pada tahun 2024 juga menjadi bagian pantauan Forpi Kota Yogyakarta. Keberadaan manusia silver, pengamen dan tukang pijat yang berada

di kawasan Malioboro Yogyakarta tak luput dari pantauan Forpi Kota Yogyakarta.

Forpi Kota Yogyakarta juga menindaklanjuti aduan warga perihal adanya kos campur yang berada di Kalurahan Bausasran,

Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta. "Perlu adanya pengawasan terhadap klinik bersalin yang ada di Kota Yogyakarta agar kasus jual beli bayi dengan modus adopsi ilegal dapat dicegah," pungkas Kamba. (*-1)-f

Fakultas Teknik UST Gelar ICGTE Siap Bersaing di Asia Tenggara

YOGYA (KR) - Fakultas Teknik, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (FT UST) Yogyakarta terus berupaya mewujudkan visinya sebagai fakultas berkompetensi di Asia Tenggara. FT UST telah menjalin banyak kerja sama internasional dengan universitas, seperti di Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam.

"Kerja sama internasional tersebut tidak hanya berhenti pada penandatanganan MoU antar fakultas saja, melainkan diwujudkan secara nyata melalui keterlaksanaan program-program kolaboratif," terang Wakil Dekan I FT UST, Ir V Reza Bayu Kurniawan ST MSc kepada KR, Sabtu (28/12).

Dikatakan Bayu, dalam rangka memeriahkan dies natalis ke-27 FT UST, fakultas menggelar International Conference on Growth Innovation Technology and Engineering (ICGTE) bertema 'Advancement in Technology and Innovation' pada 4 Desember 2024. "ICGTE ini



KR-Istimewa

Prof Waluyo Adi Siswanto (kiri) dan Dr Nguyen Tan Huynh.

merupakan salah satu implementasi menuju FT UST siap berkompetensi di Asia Tenggara," ujar Bayu yang sekaligus sebagai steering committee ICGTE.

Ketua Panitia ICGTE sekaligus dosen di FT UST, Andi Ibrahim Soumi ST MT menuturkan, ICGTE yang digelar secara daring menghadirkan pembicara Dr Nguyen Tan Huynh (Dong Nai Technology University Vietnam) yang mengulas tentang perkembangan teknologi transportasi laut dan pelabuhan, serta Prof

Waluyo Adi Siswanto (Muhammadiyah Malaysia University) yang mengulas tentang perkembangan ilmu material dengan moderator Fajar Fitriani ST Meng.

Menurut Andi, ICGTE diikuti tak kurang 150 audiens secara daring, dari Indonesia maupun negara lain di Asia Tenggara maupun India. ICGTE selain pemaparan dari dua narasumber utama, juga presentasi oleh 16 presenter dari sejumlah negara yang memaparkan artikel ilmiahnya (paper). (Dev)-f



KR-Surya Adi Lesmana

WISATA MERAPI: Wisatawan mengunjungi kawasan petilasan Mbah Marijan di lereng Gunung Merapi, Kinahrejo, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, Sabtu (28/12). Liburan Natal dan Tahun Baru kawasan lereng Merapi jadi destinasi favorit wisatawan domestik untuk menyaksikan pemandangan alam dan jejak-erupsi 2010.

RUTE DOLAN WISATA SLEMAN Wabup Danang Lepas 680 Peserta Barata ke-39

SLEMAN (KR) - Pengembaraan Akhir Tahun ke XXXIX (Barata XXXIX) Tahun 2024 Kwartir Cabang (Kwarcab) Kabupaten Sleman dilepas di lapangan Pemd Sleman, Sabtu (28/12). Kegiatan rutin akhir tahun ini dibuka secara simbolis oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa dengan pengibasan bendera start.

Barata tahun ini mengangkat tema 'Rute Dolan Wisata Sleman'. Kurang lebih ada 680 peserta yang mengikuti kegiatan ini, terdiri dari 85 Sangga Pramuka Penegak dari SMA/SMK/MAN se-Kabupaten Sleman.

Nantinya para peserta melewati rute sejumlah wilayah, antara lain Kapanewon Minggir, Moyudan, dan Mlati. Barata ke-39 akan berlangsung selama lima hari, sampai dengan 1 Januari 2025. Sebagai acara puncak, akan diadakan malam Wirapati pada 31 Desember 2024 atau malam pergantian tahun baru di Lapangan Pemd Sleman.

Menurut Wabup Danang, kegiatan ini bukan hanya sebagai tradisi tahunan, tetapi menjadi momen penting dalam melatih fisik, mengasah keterampilan, karakter kerjasama tim dan semangat ke-



KR-Istimewa

Wabup Danang Maharsa menyematkan tanda peserta Barata ke-39.

bangsaan di kalangan generasi muda, khususnya yang tergabung dalam gerakan Pramuka. "Acara ini bukan hanya menjadi wadah pembelajaran dan pembinaan bagi para peserta Barata, tetapi juga menjadi media penetrasi budaya dan potensi kepariwisataan, wawasan lingkungan hidup yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman," ujarnya.

Ditambah Danang, Sleman memiliki keindahan alam, keunikan budaya, dan daya tarik wisata yang luar biasa. Dengan adanya kegiatan

ini, diharapkan para peserta tak hanya diajak menjelajahi keindahan alam Sleman tetapi juga belajar tentang lingkungan hidup, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan dan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalamnya.

"Kegiatan Barata menjadi salah satu bentuk nyata implementasi dari nilai-nilai Kepramukaan. Di antaranya cinta alam, kepedulian terhadap sesama dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara," pungkas Danang. (Has)-f

Sejak 2021, Sleman Rampungkan Ribuan RTLH

SLEMAN (KR) - Sejak tahun 2021, Pemkab Sleman telah melakukan perbaikan 4.050 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 17 kapanewon. Sementara untuk tahun 2024 ini menargetkan sebanyak 778 rumah yang diperbaiki.

Bupati Sleman Kustini saat dikonfirmasi, Sabtu (28/12) menjelaskan, perbaikan RTLH merupakan komitmen dari Pemkab untuk memberikan fasilitas rumah layak huni bagi masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan dapat digunakan sesuai peruntukannya dalam pembangunan rumah yang dimiliki keluarga penerima manfaat.

"Penting untuk kita ketahui bahwa RTLH bukan hanya masalah

fisik bangunan. Ini juga berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu kita punya tanggung jawab untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah ini," terang Bupati.

Ditegaskan, pelaksanaan RTLH telah dilakukan dengan pendataan yang lebih akurat mengenai lokasi By Name By Address dan kondisi RTLH. Selain itu juga diberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki rumah yang layak huni dan bagaimana cara merawat rumah agar tetap aman dan sehat. "Kita juga berpesan kepada lurah dan pamong hingga tingkat kapanewon untuk mengawasi

pelaksanaan RTLH agar selesai tepat waktu," tambah Bupati.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman Mirza Anfasury mengatakan, tahun ini ada perbaikan RTLH sebanyak 778 unit. Total anggaran yang disediakan mencapai Rp 11,04 miliar.

"Bantuan yang diberikan bersifat simultan. Adapun besaran disesuaikan dengan kondisi kerusakan rumah dengan alokasi Rp 20 juta untuk rusak berat, rusak sedang Rp 15 juta dan rusak ringan sebesar Rp 10 juta. Program sudah mulai dijalankan dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar," jelas Mirza. (Has)-f



Aditya Maulana Hasymi
Dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta

PROSES kerjasama luar negeri dalam kerangka kerja diplomasi telah mengalami perluasan aktor. Negara tak lagi dominan sebagai pelaku yang mampu menginisiasi kolaborasi berbasis kegiatan produksi, pertukaran barang dan jasa, tenaga kerja, serta

investasi ini. Kini, muncul pemerintah daerah yang memastikan bahwa prosesnya akan lebih inklusif dalam bingkai kerjasama sister city (kota kembar).

Setiap negara menggunakan strategi yang dirancang khusus untuk mengantisipasi persaingan ekonomi yang semakin ketat di era globalisasi saat ini. Dengan demikian, kemampuan Indonesia untuk berkomunikasi secara ekonomi menjadi sangat penting. Pemerintah menyadari bahwa diplomasi tidak lagi bertumpu pada negara, melainkan juga pada aktor hubungan internasional non-negara (non-state actors), salah satunya pemerintah daerah.

Pemerintah daerah saat ini harus aktif mencari peluang ekonomi untuk kemajuan

nasional dan daerah mereka sendiri. Berkaca dari banyaknya kerja sama internasional yang melibatkan kepentingan daerah, pemerintah daerah menjadi mitra dalam diplomasi ekonomi. Kebijakan otonomi daerah yang didukung oleh undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dalam Pasal 367 tentang Pemerintahan Daerah, memungkinkan pemerintah daerah berpartisipasi secara aktif dalam diplomasi ekonomi di tingkat internasional.

Melihat begitu masifnya keterlibatan pemerintah daerah sebagai bagian dari diplomasi internasional, diharapkan diplomasi Indonesia akan semakin kuat dan integratif. Dengan demikian, diplomasi konvensional, yang selama ini

berada di bawah kendali pemerintah pusat, harus diganti dengan melibatkan aktor non-negara, seperti pemerintah daerah. Partisipasi daerah dalam diplomasi, atau paradiplomasi, akan membantu pembangunan negara secara keseluruhan.

Kemandirian ekonomi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi banyak daerah di Indonesia. Di tengah dinamika global yang terus berubah, kolaborasi antar Pemerintah Daerah menjadi solusi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu contoh menarik adalah sinergi antara Kota Gyeongsangbuk-do, Indonesia dan Kota Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan. Dua daerah ini memiliki potensi yang besar untuk saling mendukung dalam mengembangkan ekonomi yang mandiri dan

berkelanjutan.

Kerjasama antar dua Pemerintah Daerah lintas batas negara ini, yakni Yogyakarta (Indonesia) dan Gyeongsangbuk-do (Korea Selatan), merupakan studi kasus nyata bagaimana desa dapat berperan penting dalam proses kerjasama luar negeri dalam sister city. Keduanya saling bersinergi melalui proyek bertajuk Saemaul Undong, sebuah program pembangunan pedesaan yang menekankan pada: pola partisipasi masyarakat, pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, dan perbaikan lingkungan.

Setelah disepakati melalui Memorandum of Understanding pada tahun 2008, Yogyakarta mendapatkan bantuan dalam bentuk pendanaan guna pembangunan infrastruktur

dan pendampingan intensif dari Gyeongsangbuk-do untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Beberapa desa di wilayah Yogyakarta menjadi tempat proyek ini dalam tiga fase. Pada fase pertama dari kurun waktu 2008-2011, program berlangsung di Desa Ngawen (Gunungkidul), Desa Salam Rejo (Kulon Progo), Desa Karangtalun (Bantul). Selanjutnya pada fase kedua di periode 2015-2020 berjalan di Desa Bleberan (Gunungkidul), Desa Ponjong (Gunungkidul), dan Desa Sumbermulyo (Bantul). Berkelanjutan pada fase ketiga dari 2023 hingga 2028 nanti bertempat di Desa Nanggulan (Kulon Progo). Ketiga fase tersebut fokus pada penguatan ekonomi masyarakat melalui upaya budidaya jamur serta ikan, pendampingan keterampilan



UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

berbisnis, dan pembangunan infrastruktur sebagai stimulus peningkatan ekonomi desa.

Kerjasama antara Pemerintah Daerah Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do dalam Saemaul Undong Project tidak hanya bermanfaat bagi Masyarakat desa, tetapi juga memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Kerjasama ini menjadi contoh nyata bagaimana kerjasama antar daerah dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi penguatan sektor diplomasi melalui sinergi kerjasama luar negeri dalam bingkai sister city.